



Pengaruh Peningkatan BNPB Negara Melalui Bidang Keimigrasian terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Syamsul Bahri

Megister Manajemen, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara

Corresponding author: syamsul_bahri0@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Article history

Received :

Accepted :

Published :

Kata Kunci:

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN); Keimigrasian.

Keyword:

Non-Tax State Revenue (PNBP); State Revenue and Expenditure Budget (APBN); Immigration

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh Peningkatan BNPB Negara melalui Bidang Keimigrasian terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang mana diperoleh dari laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian nasional semakin membaik, tercermin dari angka Purchasing Managers' Indeks (PMI) manufaktur yang terus berada di level ekspansif, terkendalinya inflasi, Indeks Keyakinan Konsumen yang menguat, dan terus tumbuhnya sektor konsumsi. Semakin membaiknya perekonomian Indonesia tidak terlepas dari performa apik APBN. Performa apik APBN semester I tahun 2023 terlihat dari realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp1.407,91 triliun (57,2 persen dari target), lebih tinggi Rp71,8 triliun dari periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penerimaan perpajakan dan PNBP. Penerimaan PNBP mencapai Rp302,1 triliun (65 persen dari target) atau meningkat 5,5 persen dibandingkan tahun 2022.

ABSTRACT

State BNPB through the Immigration Sector on Economic Growth. This research uses a quantitative type of research with a descriptive approach. The type of data in this research is secondary data, which was obtained from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) report. The results of this research show that national economic conditions are improving, reflected in the manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) figures which continue to be at an expansive level, controlled inflation, a strong Consumer Confidence Index, and continued growth in the consumption sector. The improvement in the Indonesian economy cannot be separated from the good performance of the APBN. The good performance of the APBN in the first semester of 2023 can be seen from the realization of state revenues which reached IDR 1,407.91 trillion (57.2 percent of the target), IDR 71.8 trillion higher than the same period in 2022. This increase mainly came from tax revenues and PNBP. PNBP revenues reached IDR 302.1 trillion (65 percent of the target) or an increase of 5.5 percent compared to 2022.

PENDAHULUAN

Perekonomian global menunjukkan tanda-tanda pemulihan, tercermin dari meredanya tekanan inflasi di berbagai negara, berkurangnya volatilitas harga energi, kuatnya pasar tenaga kerja di negara maju, serta permintaan global yang masih tangguh. Pertumbuhan ekonomi beberapa negara mengalami penguatan, diantaranya Amerika Serikat tumbuh 1,6 persen (YoY), Tiongkok tumbuh 4,5 persen (YoY), Jepang tumbuh 1,3 persen (YoY). Sementara Perekonomian Korea Selatan dan Singapura mengalami perlambatan dengan pertumbuhan masing-masing 0,8 dan 0,4 persen (YoY). Tekanan inflasi global yang mereda disebabkan penurunan harga komoditas bahan bakar dan energi, harga logam, serta harga komoditas pertanian yang cenderung melandai (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023). Sementara itu, ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2023 tumbuh solid sebesar 5,03 persen (YoY). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tersebut didorong oleh seluruh komponen yang tumbuh positif, termasuk konsumsi pemerintah yang tumbuh setelah berkontraksi beberapa triwulan sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi pemerintah ditopang oleh tingginya peningkatan belanja barang dan belanja pegawai serta belanja pembayaran bunga utang. Selain itu didorong juga oleh peningkatan pertumbuhan komponen LNPRRT sebesar 6,2 persen (YoY). Sementara dari sisi produksi, seluruh sektor tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor transportasi dan pergudangan yang didorong oleh banyaknya momen HBKN dan masuknya bulan Ramadhan. Selanjutnya sumber pertumbuhan tertinggi masih terjadi pada sektor industri pengolahan, ditopang oleh permintaan domestik maupun global yang menguat (bappenas, 2023).

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q1 2024 tetap optimistis. Lembaga riset Danareksa Sekuritas memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,16 persen (yoy) pada Q1 2024, meningkat dari pertumbuhan 5,04 persen (yoy) pada Q4 2023 dengan didorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,02 persen (yoy) pada Q1 2024, lebih tinggi dari pertumbuhan 4,47 persen (yoy) pada Q4 2023 karena didorong oleh meningkatnya daya beli masyarakat akibat kenaikan upah minimum dan bantuan sosial dari pemerintah. Belanja pemerintah juga diperkirakan akan meningkat pada Q1 2024, seiring dengan persiapan pemilihan umum (pemilu) yang akan digelar pada Februari 2024. Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Investasi diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,10 persen (yoy) pada Q1 2024, lebih rendah dari pertumbuhan 5,02 persen (yoy) pada Q4 2023 yang disebabkan oleh faktor ketidakpastian menjelang pemilu. Ekspor diperkirakan akan tumbuh terbatas sebesar 1,70 persen (yoy) pada Q1 2024, lebih tinggi dari pertumbuhan 1,64 persen (yoy) pada Q4 2023 yang disebabkan oleh permintaan yang diperkirakan masih positif dari Tiongkok dan negara-negara berkembang lainnya. Impor diperkirakan akan semakin berkontraksi sebesar minus 0,92 persen (yoy) pada Q1 2024, dibandingkan pertumbuhan minus 0,15 persen (yoy) pada Q4 2023 yang disebabkan pelemahan rupiah terhadap dolar AS (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024).

Dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya untuk melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan berbagai transformasi kebijakan demi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Untuk mendukung upaya tersebut, dibutuhkan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan negara (Wijaya et al., 2023). Maka dari itu, di sinilah peran pendapatan negara sebagai sumber penerimaan yang diperoleh baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk kemudian dikembalikan lagi pada rakyat dalam bentuk pembangunan di segala bidang dan pemberian pelayanan oleh pemerintah. Peningkatan pembangunan ini dapat dilakukan melalui perolehan pajak. Sesuai dengan pasal 11 ayat 3 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah (Direktorat Jenderal Kependaharaan, 2020). PNBPN atau Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang tidak kalah penting dengan kedua sumber pendapatan lainnya yaitu pajak dan hibah. Pada APBN 2021, PNBPN diproyeksikan sebesar Rp 298,2 triliun. Untuk mencapai angka tersebut, perlu dilakukan pengelolaan PNBPN yang optimal dan sistematis. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2020, disebutkan bahwa pengelolaan PNBPN meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan PNBPN yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan pimpinan instansi pengelola PNBPN, memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN (Direktorat Jenderal Kependaharaan, 2020).

Salah satu upaya peningkatan PNBPN negara dapat dilakukan melalui bidang keimigrasian. Upaya ini nyatanya sudah mulai dilakukan oleh Dirjen Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi menggelar Rapat Pimpinan yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Kejaksaan Agung RI, ICA Singapore, Imigrasi Malaysia, Kedutaan Besar Australia dan narasumber penting lainnya di Hotel Ritz Carlton Jakarta pada Bulan Januari lalu. Dalam giat ini, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan terkait optimalisasi PNBPN Keimigrasian. Imigrasi Indonesia kata Sri Mulyani, memiliki peran penting dalam memfasilitasi Pembangunan ekonomi melalui PNBPN Keimigrasian yang jumlahnya semakin

meningkat. “Tahun 2018-2023, proporsi PNBП pelayanan keimigrasian sebesar 59,94%. Pada tahun 2024, proporsi PNBП pelayanan keimigrasian mencapai 75,06% dari total PNBП Kemenkumham” (CNBC, 2024). Secara umum, hal ihwal perlintasan manusia antar negara merupakan tugas fungsi imigrasi. Di Indonesia, perihal keimigrasian diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 yakni hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara (Putri, 2020). Definisi tersebut menjabarkan imigrasi dalam 4 (empat) tugas fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2011 yakni : pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Program imigrasi yang tercantum dalam dokumen rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2015-2019 adalah “Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian“ yang mencerminkan prioritas organisasi pada 5 (lima) tahun lalu pada upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian terintegrasi SIMKIM dan penegakan hukum keimigrasian melalui penindakan keimigrasian baik TAK (tindakan administratif keimigrasian) maupun projustisia (Putri, 2020). Sedangkan Renstra Ditjenim 2020-2024 diarahkan untuk menguatkan peran imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat sebagai respon terhadap penetapan Sasaran RPJMN ke-IV yang hendak mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing (Dewi & Idris, 2019). Dari kalimat sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan SDM dan wilayah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

KAJIAN LITERATUR

Menurut (Putri, 2020), pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian Pengukuran. Sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat dalam mengukur pertemuan ekonomi yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Menurut Kementerian Keuangan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah selain dari pajak, seperti pendapatan dari hasil usaha negara, bunga deposito, dan sebagainya. Menurut Kementerian Hukum dan HAM, Bidang Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat

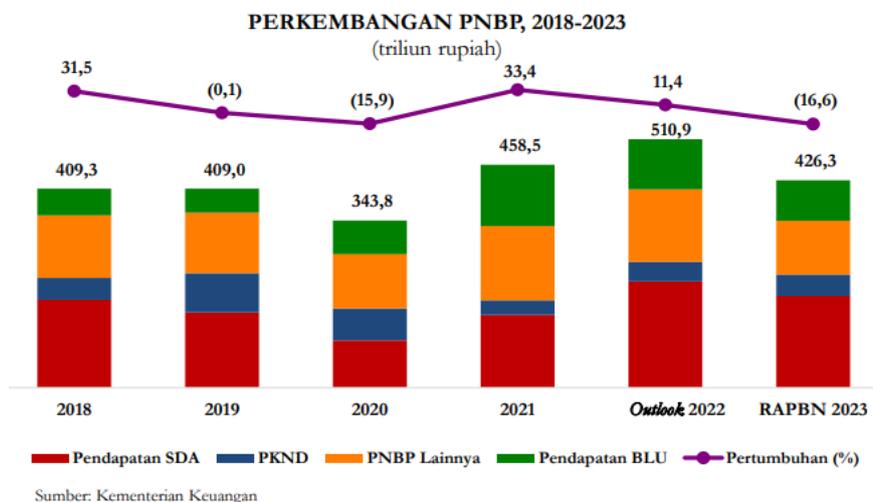
METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data Model Miles and Huberman (Ghozali, 2021). Yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Kedua Penyajian data, semua data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik maupun narasi. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Ketiga penarikan kesimpulan, jika kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan. Selama periode 2018–2021, PNBP mengalami pergerakan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,9 persen per tahun terutama dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas. Penurunan terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 15,9 persen disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada perlambatan perekonomian dan penurunan harga komoditas yang signifikan. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 33,4 persen. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas masyarakat dampak dari mulai terkendalinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan pendapatan pada layanan K/L. Selain itu, peningkatan harga komoditas seperti minyak bumi, batubara, dan CPO turut menyumbang kinerja positif PNBP di tahun 2021 terutama pada pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Pada tahun 2022, pemulihan perekonomian domestik dan tren peningkatan harga komoditas utama terus berlanjut. Kondisi ini terlihat dari capaian semester I tahun 2022 yang tumbuh hingga 38,4 persen dibandingkan periode yang sama

tahun 2021. Kenaikan ini terutama didukung oleh pendapatan SDA sejalan dengan tren peningkatan harga komoditas minyak bumi, minerba, serta pendapatan KND seiring dengan membaiknya kinerja BUMN. Berdasarkan hal tersebut, hingga akhir tahun 2022 PNBP diperkirakan akan mencapai Rp510.929,6 miliar, atau tumbuh 11,4 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Perkembangan PNBP selama 2018-2022 dan proyeksi tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah (Kemenkeu, 2022).

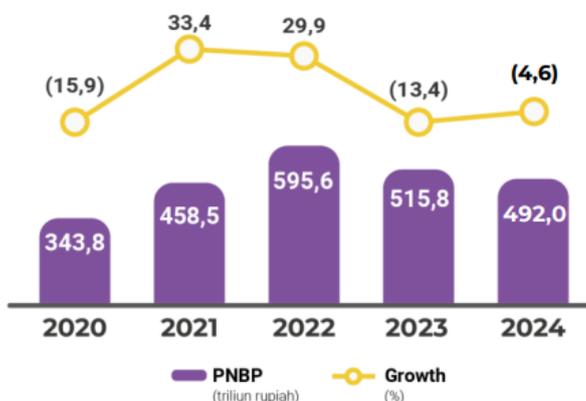


Gambar 1. Perkembangan PNBP Tahun 2018-2023

Kebijakan yang akan diambil Pemerintah dalam rangka optimalisasi PNBP pada tahun 2023 dilakukan dengan menerapkan kebijakan umum sebagai berikut (Kemenkeu, 2022):

1. Optimalisasi pemanfaatan SDA melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan pemanfaatan SDA, dan peningkatan nilai tambah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
2. Optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, kebutuhan pendanaan perusahaan, persepsi investor, regulasi dan covenant, serta dengan mendorong perbaikan kinerja serta efisiensi.
3. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan satuan kerja dan BLU serta optimalisasi pengelolaan aset BMN.
4. Penguatan tata kelola melalui peningkatan sinergi, perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi, serta peningkatan pengawasan dan kepatuhan.

Pada tahun 2020 hingga 2023 pendapatan PNBP terus mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2023 penerimaan PNBP mengalami penurunan yang cukup signifikan, untuk itu ditargetkan kembali penerimaan PNBP pada tahun 2024 akan kembali meningkat (Kemenkeu RI, 2020).

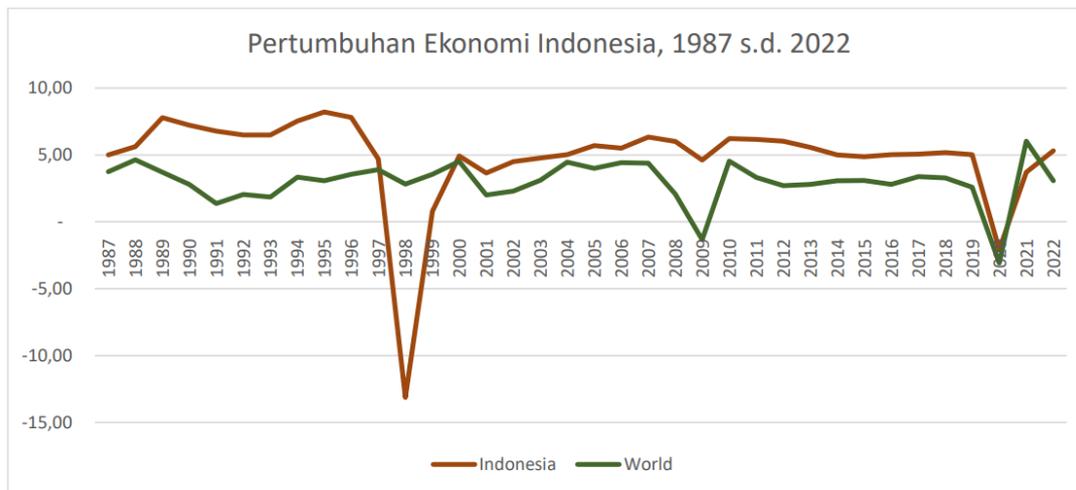


Gambar 2. Pendapatan PNBP dan Target PNBP Tahun 2024

Target PNBP 2024 dipengaruhi oleh: Fluktuasi harga minyak bumi, Peningkatan lifting migas, Moderasi harga batubara dan CPO, Implementasi Automatic Blocking System (ABS) sektor minerba, dan Dukungan kinerja BUMN. Kebijakan Umum PNBP 2024 terdiri dari Optimalisasi pemanfaatan SDA melalui penyempurnaan kebijakan dan tata kelola SDA, Optimalisasi dividen BUMN disertai perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi

BUMN, Peningkatan inovasi dan kualitas layanan K/L, Penguatan pemanfaatan aset BMN, Penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar, dan Peningkatan sinergi dan perluasan teknologi informasi.

Dengan kembalinya di level negara berpenghasilan menengah atas, Indonesia menjaga asa untuk menggapai Indonesia Maju 2045 yang memproyeksikan Indonesia berada dalam level negara berpendapatan tinggi. Untuk saat ini, batas bawah negara berpenghasilan tinggi berada di kisaran USD13.845 (Bappenas RI, 2021).



Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1987-2022

Indonesia memiliki pertumbuhan kinerja yang cukup kuat di atas pertumbuhan rata-rata dunia terutama sejak perlambatan ekonomi global paskakrisis keuangan (2008). Kontraksi terjadi di saat pandemi, bahkan membuat Indonesia keluar dari zona pendapatan berpenghasilan menengah atas. Namun demikian, pemulihan ekonomi cepat bergulir, sehingga hanya dalam waktu dua tahun kembali menjadi negara berpenghasilan menengah atas. Berdasarkan perbandingan data indikator ekonomi makro dan fiskal, Indonesia perlu terus melanjutkan dan mengeskalasi kemajuan ekonomi diantaranya sebagai berikut. Pertama, peningkatan investasi. Meskipun tergolong positif, FDI Indonesia secara rata-rata masih di bawah untuk negara-negara berpenghasilan tinggi maupun negara mitra seperti Malaysia dan China. Upaya peningkatan FDI ini sudah masuk dalam strategi jangka panjang pada kebijakan fiskal pada pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024 yang berfokus pada penguatan SDM (human capital), institutional reform, dan infrastructure gap. Dari sisi efisiensi ekonomi, Indonesia justru mengalami penurunan sejak era reformasi yang ditandai dengan meningkatnya incremental capital output ratio (ICOR) yang berada di atas 6 (periode 2014 sampai dengan 2022) terutama sejak era commodity boomerakhir 2012. Dengan demikian perlu, ditingkatkan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi seperti teknologi dan sumber daya manusia serta menjaga sisi market value dengan perbaikan tingkat konsumsi. Kedua, peningkatan ekspor baik barang maupun jasa.

Hilirisasi SDA yang digulirkan pemerintah telah menjadi pijakan awal yang kuat untuk memulai manufaktur dan mendorong ekspor. Di sisi lain, peningkatan sumber daya manusia dan alih teknologi yang didukung UU Cipta Kerja akan meningkatkan nilai kompetitif dunia jasa termasuk pariwisata di Indonesia. Dengan peningkatan ekspor baik barang dan jasa akan meningkatkan kesehatan neraca perdagangan yang mendukung fundamental ekonomi yang kokoh. Ketiga, peningkatan infrastruktur. Seiring pertumbuhan ekonomi yang meningkat paskakrisis keuangan global (2008), pemerintah telah berupaya meningkatkan infrastruktur yang ditandai dengan rasio gross capital periode 1987 sampai dengan 2022 yang dapat dijaga berkisar 29,6 persen PDB. Peningkatan tersebut seiring dengan dengan komitmen pemerintah yang akan meningkatkan porsi anggaran belanja negara dalam jangka menengah. Peningkatan tersebut diharapkan dapat tetap menjaga kaidah fiskal terutama defisit anggaran yang di bawah 3 persen PDB. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan reformasi fiskal sehingga mobilisasi pendapatan negara dan penguatan belanja dapat dilakukan guna mendukung belanja termasuk infrastruktur secara nyata. Di sisi lain, perlu ditingkatkan proyek strategis yang memiliki nilai sumber pertumbuhan ekonomi yang kuat dan memberikan dampak multiplier masyarakat dalam jangka menengah-panjang.

Pada RAPBN tahun anggaran 2023, PNBPN diperkirakan mencapai Rp426.259,1 miliar utamanya didukung oleh Pendapatan SDA, Pendapatan KND, PNBPN Lainnya, dan Pendapatan BLU (Kemenkeu, 2022).

1. Pendapatan SDA. Pendapatan SDA merupakan salah satu komponen utama PNBPN yang bersumber dari SDA migas dan SDA nonmigas. Selama periode tahun 2018–2021, Pendapatan SDA memberikan

kontribusi rata-rata sebesar 35,7 persen tiap tahun terhadap total PNB. Apabila dilihat dari pertumbuhannya, Pendapatan SDA tumbuh rata-rata sebesar negatif 6,1 persen selama periode 2018–2021. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan pertumbuhan sebesar 62,5 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 37,2 persen. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh dampak lebih rendahnya harga komoditas utama dunia terutama harga minyak dan batubara di tahun 2020 akibat perlambatan perekonomian dampak pandemi Covid-19. Dalam outlook tahun 2022, Pendapatan SDA diperkirakan mencapai sebesar Rp218.493,1 miliar, tumbuh 46,2 persen dari realisasi tahun 2021. Pertumbuhan didorong baik dari pendapatan SDA migas dan nonmigas sejalan dengan tren peningkatan harga komoditas dunia karena membaiknya perekonomian dunia pascapandemi Covid-19 dan dampak terjadinya konflik geopolitik antara Rusia-Ukraina. Pada tahun 2023, Pendapatan SDA diperkirakan mencapai sebesar Rp188.744,8 miliar, berkontraksi 13,6 persen yang dipengaruhi prospek harga komoditas yang lebih rendah dari posisi harga di tahun 2022. Pendapatan SDA tersebut terdiri dari pendapatan SDA migas sebesar Rp126.985,1 miliar dan pendapatan SDA nonmigas sebesar Rp61.759,7 miliar.

2. Pendapatan KND. PNB dari pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) terdiri atas pendapatan dari bagian Pemerintah atas laba BUMN berupa dividen dan pendapatan dari KND lainnya. Pendapatan dari dividen BUMN merupakan kontributor utama, sedangkan pendapatan dari KND lainnya dari surplus lembaga antara lain sisa surplus Bank Indonesia (BI) dan surplus Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersifat tidak tetap. Pada periode 2018–2021, pendapatan KND mengalami pertumbuhan sebesar rata-rata negatif 12,2 persen tiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 79,2 persen yang disebabkan oleh adanya realisasi pendapatan KND dari sisa surplus BI bagian Pemerintah. Kontraksi terdalam terjadi pada tahun 2021 karena berkurangnya setoran Dividen BUMN tahun 2021 sebagai dampak dari penurunan kinerja keuangan BUMN Tahun Buku 2020 akibat pandemi Covid-19 dan tidak adanya pendapatan KND dari sisa surplus BI bagian Pemerintah. Secara umum, kinerja capaian PNB KND utamanya ditentukan oleh kinerja BUMN dan Lembaga lain (seperti BI) pada tahun sebelumnya. Namun demikian, untuk PNB KND dari Sisa Surplus BI tidak selalu berulang setiap tahun mengingat PNB KND dari Sisa Surplus BI tersebut baru terealisasi apabila jumlah modal dan cadangan umum BI sudah lebih dari 10 persen dari total kewajiban moneter BI. Pada tahun 2022, realisasi pendapatan KND diperkirakan sebesar Rp40.405,3 miliar atau tumbuh 32,5 persen dari tahun 2021. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan laba bersih pada sebagian besar klaster BUMN untuk Tahun Buku 2021. Selain itu, Pemerintah juga telah melakukan beberapa kebijakan untuk mendorong perbaikan kinerja BUMN diantaranya melalui kebijakan perbaikan portofolio dan penguatan struktur keuangan BUMN melalui pembentukan holding strategis, restrukturisasi BUMN, maupun pengurangan proporsi utang terhadap struktur pendanaan (deleveraging). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMN yang pada akhirnya meningkatkan kontribusi BUMN yang salah satunya adalah peningkatan setoran dividen BUMN. Grafik 2.12 menjelaskan perkembangan pendapatan KND periode 2018-2022 dan proyeksi tahun 2023. Pendapatan KND pada RAPBN tahun anggaran 2023 diperkirakan mencapai Rp44.068,1 miliar atau tumbuh 9,1 persen dibandingkan outlook tahun 2022. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan adanya proyeksi peningkatan kinerja keuangan BUMN pada tahun 2022 seiring dengan kondisi perekonomian yang membaik setelah sebelumnya terdampak secara signifikan oleh pandemi Covid-19. Dalam rangka pencapaian target dalam RAPBN tahun anggaran 2023, kebijakan dividen BUMN tetap diarahkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Dividen BUMN pada tahun 2023 diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kinerja BUMN yang didorong oleh perbaikan ekonomi makro dan juga keberhasilan restrukturisasi BUMN. Selain itu, penentuan besaran dividen BUMN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan profitabilitas, kemampuan kas dan likuiditas perusahaan, kebutuhan untuk rencana pengembangan, persepsi investor, regulasi dan covenant, serta pelaksanaan/penyelesaian penugasan Pemerintah kepada BUMN.
3. PNB Lainnya. PNB Lainnya terdiri dari PNB Kementerian Lembaga (K/L), Penjualan Hasil Tambang (PHT), dan Domestic Market Obligation (DMO). PNB K/L adalah pendapatan yang diperoleh K/L, antara lain: (1) pendapatan dari penjualan, pengelolaan barang milik negara (BMN), dan iuran badan usaha; (2) pendapatan administrasi dan penegakan hukum; (3) pendapatan kesehatan, perlindungan sosial, dan keagamaan; (4) pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi; (5) pendapatan jasa transportasi, komunikasi, dan informatika; (6) pendapatan jasa lainnya; (7) pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan; (8) pendapatan denda; dan (9) pendapatan lain-lain. PHT adalah pendapatan yang diperoleh dari Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) yang merupakan bagian pemerintah

dari hasil produksi batubara pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Pendapatan DMO merupakan penerimaan yang berasal dari penyerahan produksi minyak mentah bagian kontraktor kepada Pemerintah/Negara untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah di dalam negeri. Dalam periode tahun 2018–2021, realisasi PNBPN Lainnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,9 persen per tahun. Pertumbuhan positif paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 37,1 persen dan terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 10,7 persen. Dalam outlook tahun 2022, PNBPN Lainnya diperkirakan mencapai sebesar Rp149.013,4 miliar, terkontraksi 2,3 persen dari tahun 2021 sebagai akibat penurunan PNBPN non layanan yang bersifat insidental antara lain Premium Obligasi Negara, Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) serta Penempatan Uang di Bank Indonesia (BI) dan Bank Umum.

4. Pendapatan BLU. BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola pengelolaan keuangan BLU ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, yang mengatur tentang fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu bentuk fleksibilitas yang dimaksud adalah penggunaan pendapatan secara langsung tanpa perlu menyetorkan terlebih dahulu ke kas negara dengan berlandaskan kepada prinsip praktik bisnis yang sehat. Sampai dengan semester I tahun 2022, terdapat 248 satuan kerja pemerintah yang tersebar pada 19 K/L yang telah ditetapkan menjadi BLU. Pada prinsipnya BLU memberikan layanan dasar kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dalam berkegiatan, berupa penyediaan 106 fasilitas layanan kesehatan, penyediaan 105 layanan pendidikan melalui PTN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), maupun pendidikan vokasi, termasuk beasiswa S1 sampai dengan S3 melalui BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan penyediaan 37 layanan lainnya. Dalam periode 2018–2021, pendapatan BLU terus mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 31,8 persen per tahun, terutama dipengaruhi oleh peningkatan dan pengembangan layanan, penambahan BLU baru, dan kontribusi pungutan ekspor kelapa sawit. Pertumbuhan terendah terjadi di tahun 2019 yang terkontraksi sebesar 11,3 persen, dan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 81,8 persen. Tingginya pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan yang berasal dari BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seiring dengan meningkatnya harga CPO di pasar internasional yang sebesar US\$1.134,8 per ton. Pada tahun 2022, realisasi pendapatan BLU diperkirakan sebesar Rp103.017,7 miliar, terkontraksi 18,2 persen dari tahun 2021. Hal ini terutama masih dipengaruhi oleh penurunan volume ekspor CPO serta adanya pemberlakuan kebijakan di bidang ekspor CPO dan produk turunannya.

Indonesia terus melaju menuju negara maju di tengah berbagai gejolak ekonomi dunia dan tantangan global. Bersama dengan Tiongkok dan India, kinerja perekonomian nasional mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global dalam satu dasawarsa terakhir. Tantangan global pascapandemi semakin berat yang berpotensi datang dari berbagai sumber risiko yaitu tensi geopolitik yang tinggi, potensi datangnya pandemi berikutnya, perubahan iklim, serta dampak digitalisasi (disrupsi). Proyeksi perekonomian global pada tahun 2024 diperkirakan akan membaik. Menurut World Economic Outlook (IMF, Juli 2023), pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diperkirakan akan berada pada level 3,0%. Sementara pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia diproyeksikan tumbuh 5,0% pada tahun 2024. Indonesia mampu kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle income) setelah mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid 19. Kinerja ekonomi tumbuh di atas 5% tujuh kuartal berturut-turut. Pemulihan ekonomi merata terjadi di semua wilayah Indonesia. Perekonomian Indonesia tahun 2024 diperkirakan mampu tumbuh 5,2% yang didesain lebih berkualitas melalui penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, serta perbaikan indeks pembangunan manusia, nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Capaian pembangunan nasional diharapkan akan menjadi pijakan kuat guna menggapai visi Indonesia Maju 2045. Oleh karena itu, diperlukan percepatan transformasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan (BPS, 2021).

Sejalan dengan proyeksi perekonomian domestik yang disertai upaya optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan iklim dunia usaha, pendapatan negara pada APBN tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp2.802,3 triliun. Kontribusi pendapatan negara terutama berasal dari penerimaan perpajakan dan PNBPN. Penerimaan Perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2024 ditargetkan mencapai Rp2.309,9 triliun atau tumbuh 9,0%. Optimalisasi Penerimaan Perpajakan sejalan dengan proyeksi

ekonomi, efektivitas implementasi UU HPP, dan Peningkatan Kepatuhan Dan Integrasi Teknologi. Meskipun perlu juga diwaspadai tantangan terutama risiko perlambatan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas utama; serta perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi, industrialisasi, dan ekonomi hijau. Selanjutnya PNBP ditargetkan sebesar Rp492,0 triliun. Beberapa faktor yang akan memengaruhi PNBP pada tahun 2024 adalah fluktuasi harga komoditas terutama minyak bumi dan batu bara. Sementara itu, kontribusi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan diproyeksikan meningkat. Selanjutnya, target penerimaan hibah pada APBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp0,4 triliun sesuai proyeksi hibah luar negeri yang terencana baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah sesuai dengan nota kesepakatan (Momerandum of Understanding).

KESIMPULAN

Laporan Semester I tahun 2023, secara keseluruhan performa APBN menunjukkan kinerja yang cukup apik. Kondisi perekonomian nasional semakin membaik, tercermin dari angka Purchasing Managers' Indeks (PMI) manufaktur yang terus berada di level ekspansif, terkendalnya inflasi, Indeks Keyakinan Konsumen yang menguat, dan terus tumbuhnya sektor konsumsi. Kondisi tersebut jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun 2022, walaupun masih dibayangi oleh berbagai ketidakpastian dan tertahannya pemulihan ekonomi global. Semakin membaiknya perekonomian Indonesia tidak terlepas dari performa apik APBN. Performa apik APBN semester I tahun 2023 terlihat dari realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp1.407,91 triliun (57,2 persen dari target), lebih tinggi Rp71,8 triliun dari periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penerimaan perpajakan dan PNBP. Penerimaan PNBP mencapai Rp302,1 triliun (65 persen dari target) atau meningkat 5,5 persen dibandingkan tahun 2022. Kenaikan tersebut dikontribusikan oleh setoran dividen BUMN dan PNBP SDA nonmigas sebagai dampak tingginya harga komoditas dunia, terutama minerba. Pendapatan SDA migas mencapai Rp60,1 triliun (45,8 persen dari target), sedangkan pendapatan SDA nonmigas mencapai Rp78,3 triliun (120,8 persen dari target) atau meningkat 94,7 persen yang dikontribusikan oleh pendapatan SDA pertambangan minerba, kehutanan, dan panas bumi. Pendapatan PNBP kekayaan negara yang dipisahkan (KND) mencapai Rp42,4 triliun (86,3 persen dari target) atau tumbuh 19,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Kenaikan tersebut terutama berasal dari setoran dividen BUMN perbankan dan beberapa BUMN lainnya seperti PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., PT Jasa Marga Tbk., dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Adapun pendapatan PNBP lainnya mencapai Rp83,0 triliun (73,2 persen dari target), yang dikontribusikan oleh kenaikan pendapatan PNBP K/L sebesar 4,7 persen dari pendapatan pelayanan dan administrasi hukum, jasa transportasi, serta layanan pertahanan. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp38,4 triliun (46,3 persen dari target), yang dikontribusikan oleh pendapatan - 13 Laporan Utama beberapa BLU di bawah Kemenkes, Kemenkominfo, Kemenhan, Kemenag, Polri, BP Batam, Kemenhub, dan KemenESDM. Sementara itu, pendapatan pengelolaan dana perkebunan sawit dan pendapatan BPJS Kesehatan mengalami reduksi (Anggaran et al., 2023).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anggaran, P., Dan, P., Negara, B., & Pertama, S. (2023). Laporan Pemerintah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023

Bappenas RI. (2021). Indonesia Dan Dunia. 5(2). https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Update_Ekonomi/Ekonomi_Makro/Perkembangan_Ekonomi_Indonesia_dan_Dunia_Triwulan_II_Tahun_2021.pdf

BPS. (2021). Laporan Perekonomian Indonesia 2021. Badan Pusat Statistik Indonesia, 1–210.

Ghozali. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Badan penerbit - Undip.

Kemenkeu. (2022). Buku II Nota Keuangan Tahun Anggaran 2023. 131–132.

Kemenkeu RI. (2020). Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusi dan Berkelanjutan

Jurnal

Dewi, E. P., & Idris, I. (2019). Pengaruh Tenaga Kerja, Migrasi Masuk Dan Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 251. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i2.6168>

- Putri, R. S. I. (2020). Penguatan Fungsi Keimigrasian Sebagai Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020 - 2024. *Journal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 3(1), 37–44.
- Wijaya, B. A., Almarorojati, F., & Laoli, J. P. (2023). Upaya Imigrasi dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia. *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 137–144. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1224>